

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Pernada Media Gorup.
- Bhayangkara, Tim Fakultas Hukum Universitas. 2012. *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2008. *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Friedrich, Carl Joachim. 2010. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media.
- H. S, Salim. & Nurbani, Erlis Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Depublish.
- Hakim, Lukman. 2020. *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pidanaaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Depublish.
- Hakim, Lukman. Saimima, Ika Dewi Sartika & Putri, Angeany Haryani. 2020. *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Depublish.
- Hamzah, Andi. 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan Dalam Beberapa Negara*. Jakarta: Trisakti.
- Harahap, M Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kansil, C. S. T & Kansil, Christine S. T. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan. 2010. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Lubis, M. Solly. 2014. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Mansur, Didik M. Arief & Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhadar. Abdulloh, Edi dan Thamrin, Husni. 2010. *Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: ITS Press.
- Muladi. 1995. *Kapital Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pangaribuan, Luhut MP. 2008. *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan..
- Putri, Anggreany Haryani. Bahan Ajar. *Peran Negara dan Lpsk Dalam Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*. Dosen Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswanto, Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1996. Sosiologi Suatu pengantar. Bandung: Rajawali Pers.
- Soekito, S. Widoyati Wiratmo. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Waluyo, Bambang. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Internet

Arjuno, Bambang, Ruba'I, Masruchin & Djatmiaa, Prija. 2017. "*Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di Indonesia*". <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>. 02 Juli 2020.

"*Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*," <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/459/380.htm>. 02 April 2020.

Komariah, Mamay. “*Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban,*” <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/421/365>. 16 Maret 2020.

